

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA SEKOLAH (Studi Kasus SMAS PASKALIS)

Septyan Eko Pambudi¹, Lia Damita Sari², Rimi Gusliana Mais³
padekemis7@gmail.com¹, liadamita94@gmail.com², rimi_gusliana@stie.ac.id³
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan serta penggunaan dana sekolah di SMAS Paskalis. Di tengah tuntutan tata kelola pendidikan yang bersih, sekolah menengah dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan setiap alokasi dana, baik yang bersumber dari pemerintah (BOS) maupun swadaya masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah, sementara data sekunder bersumber dari studi literatur melalui Google Scholar serta dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMAS Paskalis telah menerapkan aspek akuntabilitas melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Dari sisi transparansi, sekolah telah melakukan upaya keterbukaan informasi kepada orang tua murid melalui rapat pleno, meskipun digitalisasi pelaporan keuangan masih perlu dioptimalkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, integrasi kedua prinsip ini telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Tantangan utama yang ditemukan adalah beban administrasi dalam sinkronisasi sistem pelaporan manual dan digital. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem manajemen keuangan berbasis TI untuk meningkatkan efisiensi pelaporan di masa mendatang.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Dana Sekolah, SMAS Paskalis, Manajemen Keuangan.

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of accountability and transparency principles in the management and utilization of school funds at SMAS Paskalis. Amidst the demand for clean educational governance, secondary schools are required to be accountable for every fund allocation, whether sourced from the government (BOS) or community contributions. This research employs a qualitative approach with a case study method. Primary data were obtained through in-depth interviews with the school principal, treasurer, and school committee, while secondary data were gathered through a literature study via Google Scholar and relevant school accountability report documents. The results indicate that SMAS Paskalis has implemented accountability aspects by preparing the School Activity and Budget Plan (RKAS) in accordance with applicable technical guidelines. Regarding transparency, the school has made efforts to provide information to parents through plenary meetings, although the digitalization of financial reporting still needs to be optimized for broader stakeholder accessibility. Overall, the integration of these two principles has increased public trust in the school. The main challenge identified is the administrative burden in synchronizing manual and digital reporting systems. This study recommends strengthening IT-based financial management systems to improve reporting efficiency in the future.

Keywords: Accountability, Transparency, School Funds, SMAS Paskalis, Financial Management.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar untuk membangun sumber daya manusia, pendidikan yang bermutu akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan kompetitif untuk mewujudkan hal tersebut maka dapat

menciptakan generasi yang unggul dan kompetitif, serta dapat menciptakan manusia yang berkualitas, sehingga mampu bersaing dimasa depan (Damayanti, 2022). Untuk menjalankan tujuan yang didelegasikan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pendidikan Nasional memiliki visi dan misi yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Visi pendidikan nasional ialah terlaksananya metode pendidikan menjadi social intitution yang signifikan dan berkemampuan untuk memberdayakan seluruh masyarakat Indonesia menjadi warga yang bermutu agar mampu serta aktif menghadapi perubahan zaman yang terus-menerus. Mengacu kepada visi diatas, maka misi pendidikan nasional yaitu memperluas dan meratakan peluang dalam mendapatkan pendidikan yang unggul bagi seluruh rakyat Indonesia (Dalimunte, 2021). Munculnya program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai kompensasi bidang pendidikan untuk mendukung program wajib belajar. BOS adalah kebijakan pemerintah yang, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses ke pendidikan dilaksanakan melalui program BOS ini. (Intan & Zulkarnain, 2023). Program BOS menjadi program nasional di bidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan masyarakat luas (Brutu, 2022). Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Dinata et al., 2023). BOS merupakan hak setiap siswa yang disalurkan melalui sekolah untuk mendanai biaya operasional kegiatan belajar mengajar. Dan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu serta ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah (Liniarti & Nasution, 2022). Sejak diluncurkan, program BOS telah mengalami berbagai evaluasi dan penyesuaian untuk memastikan distribusi dan penggunaan dana yang optimal. Namun, laporan dan studi menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan dana BOS, termasuk masalah akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Qatrunnada et al., (2024), menemukan bahwa rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah, dan laporan realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah, belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. Hal itu juga dipertegas oleh Permata & Mustoffa, (2023), menemukan bahwa implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS terhadap penyusunan RKAS di SMP Sunan Kalijaga ada yang kurang berjalan dengan baik dikarenakan tidak melibatkan orang tua/wali peserta didik sebagaimana prinsip akuntabilitas pada Permendikbud No. 6 Tahun 2021. Suhardiman (2021) Menyatakan bahwa sekolah yang membuka ruang partisipasi bagi wali murid akan memiliki stabilitas finansial dan dukungan program yang lebih kuat. Berdasarkan temuan tersebut beberapa peneliti melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana BOS, seperti Yanti, (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOS. Wele & Mildawati, (2022), menyatakan transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOS. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana BOS pada SMA Swasta Paskalis.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian ini yang bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah SMA Paskalis. Menurut (Anto et al., 2024) Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada

multimetod, dengan interpretasi yang terlibat dalam pemahaman topik. Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu SMA Paskalis. Subjek penelitian ini adalah pengurus sekolah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, yaitu Bendahara, Kepala Sekolah dan Tata Usaha. Data primer merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, menurut (Warahmah et al., 2023) data primer adalah data yang diterima oleh para peneliti yang merujuk pada minat variabel peneliti dalam tujuan spesifik penelitian mereka. Teknik yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu wawancara kepada pengurus sekolah khususnya bagian keuangan dan observasi langsung terhadap proses pencatatan dan pelaporan keuangan sekolah. Data sekunder, menurut (Rukhmana, 2021) data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui perantara, bukan hasil pengumpulan langsung oleh peneliti. Data ini umumnya berasal dari sumber-sumber terdokumentasi seperti literatur, arsip, maupun data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu Dokumen laporan keuangan sekolah, dan RKAS(Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana alokasi dana BOSP Reguler tahun ini menitikberatkan pada optimalisasi sarana prasarana dan efisiensi tata kelola sekolah dengan total pagu anggaran sebesar Rp252.840.000. Fokus utama diarahkan pada pengembangan serta pemeliharaan lingkungan belajar, di mana sektor sarana dan prasarana menyerap dana sebesar Rp142.325.600 yang didominasi oleh belanja modal untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sekolah. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh fasilitas pendidikan tetap dalam kondisi prima untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara berkelanjutan. Di sisi lain, sekolah juga mengalokasikan dana sebesar Rp110.514.400 untuk Standar Pengelolaan yang seluruhnya bersifat belanja operasi. Komponen terbesar dalam kategori ini diperuntukkan bagi pembiayaan langganan daya dan jasa, seperti listrik dan internet, serta pengadaan bahan habis pakai untuk keperluan administrasi. Pembagian anggaran yang proporsional antara kebutuhan fisik dan operasional ini diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah.

Tabel 1. Kertas Kerja Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (Rkas) Tahun 2025

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran BOSP REGULER	
					Belanja Operasi	Belanja Modal
1		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	142.325.600	35.660.000	106.665.600
2		05.02.	Pengembangan Perpustakaan	12.660.000	12.660.000	0
3		05.08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	129.665.600	23.000.000	106.665.600
4		05.08.03.	Pemeliharaan Peralatan Sekolah	82.258.000	23.000.000	59.258.000
5		05.08.05.	Pemeliharaan Perlengkapan Sekolah	47.407.600	0	47.407.600
6		06.	Standar Pengelolaan	110.514.400	110.514.400	0
7		06.05.	Pengelolaan Sekolah	2.254.244	2.254.244	0
8		06.05.0	Pembelian Bahan Habis Pakai	2.254.244	2.254.244	0

		8.	untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)		4	
9		06.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa	108.260.156	108.260.156	0
10		06.07.01.	Pembayaran daya listrik	70.760.156	70.760.156	0
11		06.07.05.	Pembayaran jasa internet	37.500.000	37.500.000	0
Jumlah				252.840.000	146.174.400	106.665.600

Sumber: Data diolah

Gambaran Umum Anggaran Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) untuk sumber dana BOSP Reguler menetapkan total pagu sebesar Rp252.840.000. Secara garis besar, alokasi dana ini terbagi ke dalam dua porsi utama, yaitu Belanja Operasi sebesar Rp146.174.400 untuk mendukung aktivitas harian dan pemeliharaan rutin, serta Belanja Modal sebesar Rp106.665.600 yang ditujukan untuk pengadaan aset tetap guna meningkatkan fasilitas pendidikan di sekolah. Strategi pembagian ini didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah. Menurut Bendahara BOSP SMAS PASKALIS, yaitu:

"Penentuan besaran belanja modal tahun ini memang kami fokuskan pada perbaikan aset yang rusak berat agar tidak mengganggu kenyamanan siswa di kelas, sementara belanja operasi kami kunci untuk kebutuhan yang tidak bisa ditunda."

Porsi terbesar dari anggaran ini dialokasikan pada Standar Pengembangan Sarana dan Prasarana dengan total Rp142.325.600. Sekolah menitikberatkan pada pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sekolah agar proses belajar mengajar tetap optimal, di mana investasi belanja modal untuk sektor ini mencapai lebih dari seratus juta rupiah. Terkait hal ini, Kepala Sekolah SMAS PASKALIS menjelaskan bahwa:

"Kondisi peralatan laboratorium dan kelas sudah saatnya mendapatkan peremajaan melalui pemeliharaan skala besar agar masa pakainya lebih panjang."

Selain itu, pengembangan perpustakaan juga tetap menjadi perhatian dengan alokasi Rp12.660.000 guna mendukung gerakan literasi siswa. Sementara itu, untuk Standar Pengelolaan, sekolah mengalokasikan dana sebesar Rp110.514.400 yang seluruhnya bersifat belanja operasi. Komponen utama dalam bagian ini adalah pembiayaan langganan daya dan jasa, di mana pembayaran listrik dan internet menjadi pengeluaran rutin yang dominan. Hal ini menunjukkan komitmen sekolah dalam menyediakan lingkungan belajar berbasis digital. Sebagai penunjang, dana sebesar Rp2.254.244 juga disisihkan untuk bahan habis pakai guna memastikan kelancaran layanan birokrasi sekolah sehari-hari.

Tabel 2. Laporan Realisasi Kegiatan tahun 2025

Uraian Kegiatan	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total (Rp)
Perpustakaan	12.660.000	0	12.660.000
Pemeliharaan Peralatan	23.000.000	59.258.000	82.258.000
Pemeliharaan Perlengkapan	0	47.407.600	47.407.600

Uraian Kegiatan	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total (Rp)
ATK & Bahan Habis Pakai	2.254.244	0	2.254.244
Listrik & Internet	108.260.156	0	108.260.156
TOTAL	146.174.400	106.665.600	252.840.000

Sumber: Data diolah

Penuturan kepala sekolah SMAS PASKALIS:

"Tahun ini, kebijakan anggaran kami arahkan untuk memastikan fasilitas fisik sekolah tetap prima sekaligus menjamin keberlangsungan ekosistem digital. Alokasi modal yang cukup besar untuk pemeliharaan peralatan bukan sekadar perbaikan, melainkan investasi jangka panjang agar proses belajar mengajar tidak terkendala oleh fasilitas yang rusak. Kami ingin memberikan lingkungan belajar yang layak bagi siswa, karena sarana yang baik adalah fondasi dari mutu pembelajaran yang berkualitas."

Kemudian menurut bendahara sekolah SMAS PASKALIS mengatakan bahwa:

"Dalam penyusunan RAK kali ini, kami harus sangat teliti dalam menyeimbangkan antara belanja operasi dan belanja modal. Sebagian besar belanja operasi, yakni sekitar 108 juta rupiah, memang terkunci untuk daya dan jasa seperti listrik serta internet karena kebutuhan digitalisasi sekolah yang sangat tinggi. Meski begitu, kami tetap menjaga efisiensi pada pos administrasi dan ATK agar alokasi untuk pemeliharaan sarana tetap mendapatkan porsi yang memadai sesuai dengan pagu yang tersedia."

Belanja Operasi yang dialokasikan sebesar Rp146.174.400 difokuskan pada pembiayaan kebutuhan rutin dan layanan dasar guna menjamin kelancaran aktivitas pendidikan setiap hari. Komponen biaya terbesar dalam kategori ini adalah langganan daya dan jasa yang menyerap dana sebesar Rp108.260.156, yang secara spesifik digunakan untuk pembiayaan listrik sebesar Rp70.760.156 dan layanan internet sebesar Rp37.500.000 untuk mendukung digitalisasi pembelajaran. Selain itu, terdapat alokasi sebesar Rp23.000.000 untuk jasa pemeliharaan rutin peralatan sekolah agar tetap layak pakai, serta Rp12.660.000 untuk pengembangan perpustakaan guna memperkuat literasi siswa. Sebagai pendukung administrasi kantor, dialokasikan pula biaya sebesar Rp2.254.244 untuk pengadaan bahan habis pakai seperti alat tulis kantor (ATK), tinta printer, dan perlengkapan instalasi listrik sederhana. Di sisi lain, Belanja Modal dengan total Rp106.665.600 dialokasikan secara strategis untuk investasi fisik yang memberikan manfaat jangka panjang bagi sarana dan prasarana sekolah. Dana ini terbagi ke dalam dua fokus utama, yakni pemeliharaan peralatan sekolah sebesar Rp59.258.000 yang mencakup perbaikan besar atau pengadaan komponen aset tetap, serta pemeliharaan perlengkapan sekolah sebesar Rp47.407.600 untuk peremajaan fasilitas kelas dan gedung. Melalui pembagian detail ini, terlihat bahwa sekolah memprioritaskan ketahanan fasilitas fisik dan kestabilan akses teknologi sebagai fondasi utama dalam mendukung standar pengelolaan dan standar sarana prasarana pendidikan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah BOS

Akuntabilitas dibutuhkan untuk menjadikan laporan pengelolaan keuangan sekolah menjadi berkualitas dan dapat dipercaya. Penerapan prinsip akuntabilitas di dalam penelitian ini berarti pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana sekolah pemerintah. Sumber dana yang didapatkan oleh sekolah yaitu dana bantuan operasional sekolah (BOS),

sumber dana tersebut digunakan oleh pihak sekolah dalam melaksanakan program kegiatan dan kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada beberapa indikator tercapainya akuntabilitas menurut Suliyanto (2020) yaitu Pembuatan Keputusan dimana keputusan ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait, akurasi dan kelengkapan informasi yang dimana ini menjadi sangat penting untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas, kejelasan dan sasaran kebijakan harus jelas sehingga kegiatan yang didanai dari dana BOS tidak boleh ditafsirkan secara berlebihan dalam artian tidak multi tafsir, kelayakan dan konsistensi yang menjadi prioritas utama bantuan operasional sekolah (BOS) adalah untuk biaya operasional non-personil sekolah dan bukan untuk investasi atau kesejahteraan guru. Hal ini sesuai dengan penuturan kepala sekolah SMAS PASKALIS, yaitu:

"Akuntabilitas bagi kami bukan sekadar tertib administrasi di atas kertas, melainkan bagaimana dana BOSP ini benar-benar memberikan dampak nyata (outcome) bagi siswa. Setiap rupiah dalam alokasi 252 juta ini harus memiliki dasar kebutuhan yang kuat dan hasil yang terukur, sehingga saat diaudit maupun ditinjau oleh publik, kami bisa menunjukkan bahwa penggunaan dana sudah tepat sasaran dan tepat guna."

Penerapan akuntabilitas dapat dilihat dari akuntabilitas dalam pencatatan dan akuntabilitas pelaporan dana BOS.

a. Akuntabilitas dalam pencatatan dana BOS

Akuntabilitas dalam pencatatan dana BOS itu dapat dilihat dari adanya dokumentasi dan informasi dalam pengelolaan anggaran di sekolah yang sudah diterapkan oleh SMAS PASKALIS, hal ini sesuai dengan penuturan kepala sekolah SMAS PASKALIS, yaitu:

"Dokumentasi tersebut disimpan dengan baik dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan seperti auditor, dinas Pendidikan, atau pihak lainnya".

Kemudian menurut bendahara sekolah SMAS PASKALIS mengatakan bahwa:

"Bendahara membuat dan menyimpan dengan baik semua dokumen terkait proses penganggaran seperti rencana anggaran, realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban".

Kemudian menurut guru SMAS PASKALIS yang menyatakan bahwa:

"guru dapat melihat data rencana anggaran, realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban".

Implementasi akuntabilitas di SMAS Paskalis telah memenuhi dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum serta akuntabilitas proses. Pernyataan Kepala Sekolah mengenai aksesibilitas dokumen bagi auditor dan Dinas Pendidikan menunjukkan komitmen lembaga terhadap kepatuhan hukum dan transparansi untuk mencegah penyalahgunaan dana. Hal ini diperkuat oleh peran Bendahara yang menjalankan penatausahaan keuangan secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban (LPJ). Proses dokumentasi yang rapi dan terorganisir ini memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memiliki rekam jejak administrasi yang valid dan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku dalam manajemen keuangan publik. Pada dimensi akuntabilitas program dan kebijakan, SMAS Paskalis menunjukkan transparansi yang inklusif dengan memberikan akses data anggaran kepada para guru. Keterbukaan informasi ini memungkinkan pemangku kepentingan internal untuk memverifikasi bahwa realisasi anggaran telah selaras dengan program pendidikan yang direncanakan. Dengan adanya pengawasan horizontal dari staf pengajar, sekolah tidak hanya menggugurkan kewajiban pelaporan secara vertikal kepada otoritas pendidikan, tetapi juga membuktikan bahwa setiap kebijakan penganggaran diambil secara bertanggung jawab demi kepentingan kualitas pembelajaran.

b. Akuntabilitas dalam pelaporan dana BOS

Akuntabilitas dalam pelaporan dana BOS yang dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemerintah di buat oleh tim manajemen BOS dan secara khusus oleh bendahara. Menurut buku petunjuk teknis BOS, laporan pertanggung jawaban keuangan dana BOS disampaikan setiap semester, dan tahunan.

Hal ini sesuai dengan penuturan dari kepala sekolah SMAS PASKALIS yang mengatakan bahwa

"Kepala sekolah memastikan bahwa seluruh pengelolaan keuangan di sekolah terutama BOS, mengikuti pedoman yang ada. Laporan tersebut mencakup rincian penerimaan dan penggunaan dana BOS tiap semester, serta capaian program/kegiatan yang didanai oleh dana BOS serta peran bendahara dalam mempelajari JUKNIS pengelolaan BOS sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pembukuan dan pelaporan keuangan".

Kemudian menurut bendahara sekolah SMAS PASKALIS mengatakan bahwa:

"Bendahara BOS menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dengan menjadikan Juknis sebagai standar operasional prosedur (SOP) dalam pembukuan. Hal ini memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban tiap semester, yang mencakup detail penerimaan dan realisasi kegiatan, disusun secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan sekolah yang ditetapkan Kepala Sekolah."

Kemudian menurut guru SMAS PASKALIS yang menyatakan bahwa:

"Sebagai pendidik di SMAS Paskalis, kami melihat bahwa transparansi pengelolaan dana BOS yang dijalankan Kepala Sekolah dan Bendahara menciptakan rasa aman dan kepercayaan. Ketika pembukuan dilakukan sesuai Juknis dan dilaporkan secara terbuka setiap semester, kami dapat melihat korelasi jelas antara anggaran yang turun dengan ketersediaan sarana penunjang pembelajaran yang memadai di kelas."

Akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMAS Paskalis diwujudkan melalui penguatan tata kelola manajerial yang mengintegrasikan kebijakan kepala sekolah dengan kepatuhan teknis bendahara. Dengan menjadikan Juknis sebagai standar operasional prosedur (SOP) yang kaku, sekolah memastikan bahwa setiap rincian penerimaan dan penggunaan dana memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat ditelusuri secara akurat. Langkah bendahara dalam mendalami aturan pembukuan menunjukkan adanya tanggung jawab profesional untuk meminimalisir kesalahan administratif, sehingga laporan semesteran bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen kendali mutu yang menjamin seluruh anggaran terserap sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan pemerintah. Lebih dari sekadar ketertiban administratif, sistem ini menciptakan transparansi yang berdampak langsung pada kepercayaan dan iklim kerja di sekolah. Ketika laporan keuangan disajikan secara terbuka dan selaras dengan capaian program, para guru selaku ujung tombak pendidikan dapat merasakan dampak nyata dari anggaran tersebut melalui ketersediaan sarana pembelajaran yang memadai. Sinergi ini membuktikan bahwa akuntabilitas di SMAS Paskalis telah mencapai level substansial, di mana pengelolaan keuangan tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen di atas kertas, tetapi juga dari kemampuannya dalam mendukung efektivitas belajar mengajar dan membangun kepercayaan seluruh pemangku kepentingan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dana BOS terletak pada sinergi antara ketelitian pencatatan sebagai fondasi teknis dan transparansi pelaporan sebagai perwujudan tanggung jawab manajerial. Pencatatan yang akuntabel menjamin bahwa setiap transaksi didokumentasikan secara presisi sesuai Juknis agar memiliki validitas hukum, sementara pelaporan yang akuntabel memastikan bahwa realisasi anggaran tersebut selaras dengan capaian program pendidikan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga sekolah. Dengan demikian, integritas dalam proses pencatatan dan keterbukaan dalam pelaporan menjadi kunci utama bagi SMAS Paskalis untuk membangun kepercayaan publik serta menjamin bahwa setiap rupiah dana

BOS digunakan secara efektif untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah BOS

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Informasi mengenai keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dana BOS, merupakan salah satu prinsip yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dalam menjalankan undang-undang sistem pendidikan nasional tentang pengelolaan dana BOS. Pengelolaan dana BOS dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas public. Transparansi dalam pengelolaan keuangan di sekolah sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan orang tua siswa, Masyarakat dan pemerintah. Menurut Nico (2007:21-22) indikator pencapaian transparansi pada lembaga pendidikan (sekolah) yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persoalan transparansi, adanya akses stakeholder terhadap transparansi anggaran dana, adanya audit yang independent dan efektif, dan juga adanya keterlibatan stakeholder dalam pembuatan Keputusan anggaran. Untuk mengetahui penerapan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMAS PASKALIS, peneliti melakukan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan. Informasi ini penulis dapatkan dari informan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yaitu wawancara dilakukan terhadap kepala sekolah, bendahara sekolah, dan guru yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Transparansi itu dilakukan mulai dari proses perencanaan, pengelolaan, penggunaan, dan pengawasan terhadap dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Hal ini sesuai dengan penuturan kepala sekolah SMAS PASKALIS, yaitu:

"Sebagai upaya menjaga transparansi dalam pengelolaan dana BOSP, sekolah menerapkan sistem pelaporan terbuka. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Sekolah bahwa, 'Keterbukaan adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat'. Hal ini didukung oleh proses teknis yang disiplin di bagian keuangan, di mana Bendahara memastikan bahwa, 'Setiap nota dan bukti transaksi dapat diakses dan diperiksa sewaktu-waktu.'"

a. Transparansi dalam perencanaan dana BOS

Penerapan prinsip transparansi bertujuan untuk membangun kepercayaan semua pihak dari rencana anggaran kegiatan yang akan di laksanakan. SMAS PASKALIS membangun kepercayaan stakeholder dengan memberikan keterbukaan informasi dalam proses perencanaan kegiatan siswa setiap tahunnya dengan memberikan informasi anggaran yang harus di bayarkan siswa pertahun. Berdasarkan penjelasan dari para narasumber, keterbukaan dalam proses perencanaan anggaran sekolah kepada stakeholders internal yaitu pihak sekolah melibatkan stakeholder internal, seperti guru, komite sekolah, dan tenaga kependidikan dalam proses penyusunan rencana anggaran sekolah. Kepala sekolah juga memastikan bahwa proses penyusunan RKAS dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Masukan dan saran dari para stakeholder internal sangat dipertimbangkan dalam prioritas penggunaan anggaran sekolah. Dalam penyusunan rencana anggaran bendahara melibatkan guru dalam proses penyusunan rencana penggunaan dana BOS dan anggaran lainnya, bendahara juga mengatakan bahwa mereka menyediakan informasi anggaran sekolah secara terbuka kepada guru dan komite sekolah kemudian menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara berkala kepada kepala sekolah dan komite sekolah. Dalam pelaksanaannya, terdapat rapat perencanaan sekolah yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dimana para guru juga dibebaskan memberikan masukan dan usulan terkait kebutuhan pembelajaran dan pengembangan sekolah yang perlu dianggarkan dan pihak guru juga mengetahui alokasi anggaran yang

digunakan. Dari beberapa pendapat informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi dalam perencanaan dana BOS di SMAS PASKALIS sudah berjalan dengan cukup baik dengan terpenuhinya indikator transparansi yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dan dipedomani untuk Menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) dan juga adanya keterlibatan stakeholder dalam pembuatan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS).

b. Transparansi dalam pencatatan dana BOS

Transparansi dalam pencatatan dana BOS pada SMAS PASKALIS bertujuan supaya stakeholder dapat percaya dengan pengelolaan dana BOS dengan adanya keterbukaan pencatatan dalam setiap kegiatan yang dibuktikan oleh adanya bukti fisik dari setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan jawaban dari beberapa informan seperti kepada kepala sekolah SMAS PASKALIS yang mengatakan bahwa:

“beliau memastikan bahwa bendahara sekolah melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan keuangan dengan baik bahkan kepala sekolah memperbolehkan stakeholder internal untuk mengakses informasi keuangan sekolah termasuk laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran”,

hal ini diikuti dengan penuturan bendahara sekolah yang mengatakan bahwa

“Hasil pencatatan laporan keuangan disampaikan secara berkala kepada kepala sekolah dan komite sekolah, bendahara juga menyediakan informasi keuangan bagi guru yang membutuhkan untuk kepentingan pembelajaran atau kegiatan lainnya, dimana para guru dapat mengakses informasi keuangan sekolah, seperti laporan penggunaan dana BOS dan anggaran lainnya”.

Dari beberapa pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa Trnsparansi dalam pencatatan Dana BOS SMAS PASKALIS itu sudah sesuai dengan indikator transparansi yaitu adanya akses stakeholder pada pencatatan anggaran, yang Dimana setiap pencatatan itu sudah tersedia dalam buku kas sekolah dengan disertai bukti-bukti transaksi yang dilakukan.

c. Transparansi dalam penggunaan dana BOS

Transparansi dalam penggunaan dana BOS pada SMAS PASKALIS bertujuan agar stakeholder percaya dengan pengelolaan dengan adanya akses stakeholder terhadap penggunaan anggaran yang dimana sekolah harus terbuka tentang penggunaan anggaran dan dapat diumumkan serta dipublikasikan mengenai hasil laporan anggaran. Dalam penggunaan anggaran dana BOS juga harus disesuaikan dengan rencana kegiatan anggaran sekolah yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perolehan jawaban dari beberapa informan seperti kepada kepala sekolah SMAS PASKALIS yang menjelaskan tentang penggunaan dana BOS, bahwa:

“Sekolah menggunakan anggaran secara transparan dan sesuai dengan rencana yang telah disepakati Bersama. kepala sekolah juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban penguanaan anggaran kepada seluruh stakeholder internal secara berkala”.

Selanjutnya bendahara sekolah SMAS PASKALIS mengatakan Bahwa:

“Bendahara sekolah menyediakan bukti-bukti penggunaan angaran seperti kuitansi, faktur atau nota kepada kepala sekolah dan komite sekolah”.

Kemudian guru SMAS PASKALIS juga mengatakan, bahwa:

“Guru merasa bahwa penggunaan anggaan sekolah telah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembelajaran”.

Penerapan prinsip transparansi dalam penggunaan dana BOS SMAS PASKALIS sudah berjalan dengan cukup baik karena sudah sesuai dengan indikator. Dengan adanya kerangka kerja yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari setiap pertanggung

jawaban kegiatan. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya dapat memberikan informasi anggaran dana kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran, untuk memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan khususnya pihak internal dan eksternal yaitu dengan adanya dokumen serta bukti-bukti lainnya. Dari adanya pendapat dan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa SMAS PASKALIS telah memenuhi prinsip transparansi dalam penggunaan dana BOS. Hal tersebut dapat dilihat dari terbukanya informasi mengenai penerimaan dana BOS serta memberikan kesempatan kepada warga sekolah dalam proses pembuatan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) dengan adanya keterlibatan guru dan karyawan dalam tim manajemen BOS dalam menentukan anggaran kegiatan sekolah serta untuk proses kegiatan belajar mengajar, dan juga informasi dapat dengan mudah diketahui karena pihak sekolah telah mempublikasikan penggunaan anggaran tersebut melalui papan informasi sekolah.

d. Transparansi dalam pengawasan dana BOS

Transparansi dalam pengawasan dana BOS SMAS PASKALIS terdiri dari pengawasan internal sekolah dan pengawasan eksternal sekolah. Pihak internal sekolah yang melakukan pengawasan adalah auditor yang di siapkan oleh pihak yayasan. Pengawas dari pihak eksternal sekolah adalah Dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat. Hal ini dibuktikan dengan adanya perolehan jawaban dari beberapa informan seperti kepala sekolah SMAS PASKALIS yang memberikan penjelasan terkait pengawasan dana BOS:

“Kepala sekolah menyatakan bahwa sekolah memiliki auditor internal yang bertugas untuk mengawasi dan memeriksa penggunaan dana BOS secara berkala “.

Selanjutnya menurut penjelasan dari bendahara sekolah SDN Margabakti yang mengatakan bahwa:

“Hasil audit disampaikan kepada kepala sekolah dan komite sekolah sebagai bentuk Transparansi”.

Kemudian menurut guru SMAS PASKALIS yang menyatakan bahwa:

“Sekolah memiliki auditor internal yang bertugas untuk mengawasi penggunaan dana BOS, guru juga merasa bahwa kehadiran auditor internal dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolah”.

Dari beberapa pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi pengawasan dana BOS di SMAS PASKALIS sudah sesuai dengan indikator, karena dengan adanya Lembaga audit yang independent dan efektif yang bertujuan untuk memantau ketepatan dan kebenaran kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Dengan adanya hasil wawancara dari informan mengenai transparansi perencanaan, pencatatan, penggunaan, dan pengawasan dana BOS, maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi pengelolaan dana BOS SMAS PASKALIS sudah cukup baik karena sudah memenuhi indikator pencapaian transparansi. Yang dimana dalam pembuatan rencana anggaran kegiatan sekolah yang disusun sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan sudah melibatkan kepala sekolah, bendahara, komite dan guru pencatatannya disertai dengan adanya bukti-bukti yang dicatat di buku kas sekolah setiap adanya transaksi, penggunaan sudah terealisasi sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya, serta pengawasan dana BOS sudah diawasi oleh pihak Dinas Pendidikan yang terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut Penerapan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional

sekolah (BOS) di SMAS PASKALIS masih menghadapi tantangan. Walaupun pencatatan dan pelaporan dana telah dilakukan, penerapan akuntabilitas belum sepenuhnya konsisten. Masih ada kendala dalam pelaksanaan audit internal dan monitoring yang berkelanjutan, serta dalam penyampaian laporan keuangan kepada stakeholder. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada peningkatan dalam pengawasan dan pertanggung jawaban agar pengelolaan dana dapat lebih akuntabel. Penerapan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMAS PASKALIS sudah diterapkan, terutama dalam hal perencanaan dan pencatatan anggaran dana. SMAS PASKALIS telah melibatkan berbagai pihak terkait seperti guru, komite sekolah, dan tenaga kependidikan, dalam penyusunan Rencana Kegiatan anggaran Sekolah (RKAS). Ini menunjukkan bahwa upaya untuk memastikan keterbukaan informasi kepada stakeholder internal telah dilakukan. Namun, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan transparansi belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal keterlibatan stakeholder eksternal dan publikasi informasi secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Brutu, D. (2022). Analisis Efektivitas Perencanaan Dan Pelaksanaan Dana Bos Sekolah Dalam Meningkatkan Niali Akuntabilitas laporan Pertanggungjawaban Dana Bos Di SDN 105271 Serbajadi Kecamatan Sunggal. *Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 1(01).
- Damayanti, S. E. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sdn Palebon 03 Semarang. *Fakultas Ekonomi Universitas Semarang*, 1.
- Dinata, H. S., Putrib, A. M., & Aristic, M. D. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 49–57.
- Intan, T. P., & Zulkarnain, Z. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Kejuruan Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(2), 156. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i2.8307>
- Krina, L. L. (2017). Indikator Dan Alar Ukur Prinsip Akuntansi dan Transparans. *Salemba Empat*.
- Liniarti, S., & Nasution, R. S. A. (2022). Operasional Sekolah (BOS) Dalam Madrasah Aliyah Negeri Di Kabupaten Karo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(6), 275–287.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi Offset.
- Maros, H., & Juniar, S. (2016). *Transparasi*. 1–23.
- Nodera, M. S., Kusumastuti, R., & Jumaili, S. (2023). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMAN 7 Merangin Tahun 2021. *Owner*, 7(1), 799–809. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1247>
- Wahinun, M. I., Supardi, S., & Isnaini, N. F. (2019). Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (bos) pada mi roudlotus salam. *Management of BOS Funds, Accountability, Transparency*, 1–14. <http://repository.unim.ac.id/id/eprint/346>
- Waluyo, T., . H., & . S. (2023). Transparansi Penggunaan Dana Bos di Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 28–37. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.316>.